

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Amerika Serikat merupakan negara federasi yang pemerintahannya berdasarkan konstitusi dan menganut sistem demokrasi perwakilan. Negara tersebut merdeka pada 4 Juli 1776. Awalnya negara itu terbentuk dari tiga belas koloni Inggris yaitu Virginia, Maryland, New York, New Jersey, Georgia, Pennsylvania, Connecticut, Delaware, Massachusetts, New Hampshire, South Carolina, North Carolina, dan Rhode Island. Ketigabelas koloni tersebut mencerminkan asal-usul yang beragam.

Dalam naskah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang ditulis Thomas Jefferson sangat mengutamakan kebebasan dan hak (Gonick, 2008: 80). Berikut ini merupakan kutipan dari naskah tersebut:

“Bahwasanya kami perpegang teguh kepada kebenaran ini dengan suatu keyakinan bahwa semua manusia diciptakan dalam keadaan sederajat, mereka diberkati oleh Pencipta-Nya hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat, bahwa di antara hak-hak asasi itu ialah hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak mencari kebahagiaan...” (Morris, 1986: 1215).

Dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat diatas dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan semua umat manusia ialah tanpa membedakan ras, kekayaan atau bahkan jenis kelamin. Namun dalam deklarasi yang menyerukan “semua manusia diciptakan sederajat” menggunakan kata *men* yang berarti laki-laki. Hal ini semakin menegaskan bahwa dalam kehidupan politik perempuan selalu menjadi pengecualian bahkan mereka percaya bahwa hanya laki-lakilah yang bisa mengambil keputusan secara logis dan rasional. Pertanyaan yang timbul ialah, jika hanya laki-laki yang menjadi warga negara dan perempuan bukan warga negara lalu apa hubungan mereka dengan negara?

Pada awal kemerdekaannya negara itu tidak memberikan hak suara pada perempuan, yang menurut penulis tidak sesuai dengan makna naskah deklarasinya. Selain itu hal ini menjadi sangat janggal, karena jauh sebelum deklarasi kemerdekaan itu telah terlebih dahulu lahir sebuah konsensus mengenai hak asasi yaitu *Magna Charta* di Inggris yang memaknai hak asasi manusia lebih penting dari kedaulatan raja. Seharusnya bagi negara yang mengusung demokrasi dan kebebasan sebagai landasan negaranya isu mengenai perempuan pasti akan menjadi perhatian, karena pada dasarnya hak asasi itu dimiliki oleh setiap manusia termasuk juga perempuan.

Tidak diberikannya hak suara pada kaum perempuan di Amerika Serikat itu menandakan bahwa kaum perempuan dianggap kaum yang termarginal. Pandangan masyarakat terhadap perempuan disana pada masa itu dibentuk karena berbagai faktor, diantaranya budaya kaum victorian Inggris yang menganggap bahwa seorang perempuan itu harus bersikap halus, lemah lembut, anggun dan penurut. Pada masa itu banyak orangtua mendidik anak perempuannya dengan kriteria tersebut dengan tujuan agar mendapatkan suami yang baik. Hal tersebut menjadi pendidikan formal bagi kaum perempuan di abaikan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan seorang perempuan ialah untuk membina rumah tangga dan hal itu tidak memerlukan pendidikan yang tinggi (Fakih, 1999: 35). Selain itu pengaruh agama juga sangatlah kuat, doktrin-doktrin kristen yang pada saat itu lebih menghendaki kepatuhan perempuan atas laki-laki membuat ruang gerak perempuan sangat sempit sehingga menghalangi perempuan untuk mengembangkan dirinya. Hal-hal mengenai pandangan sosial masyarakat terhadap kaum perempuan, doktrin-doktrin agama dan kebijakan pemerintah dengan tidak memberikan hak suara bagi perempuan sangatlah berbeda dengan ide-ide kebebasan dan demokrasi yang diusung oleh Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat sendiri perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak suaranya atau yang lebih dikenal dengan gerakan *suffrage* telah dimulai sejak awal abad ke-19. Namun pergerakan *suffrage* di negara tersebut

tidak begitu mendapat kemajuan. Hal itu disebabkan karena pergerakan perempuan ini terpecah dan tidak terkonsolidasi dengan baik, yakni selain ada organisasi perempuan yang memperjuangkan emansipasi ada juga organisasi perempuan yang anti emansipasi (Buechler, 1990: 18). Pergerakan perempuan ini terpecah hingga tahun 1860'an. Gerakan *suffrage* di Amerika Serikat di persatukan kembali dalam organisasi NAWSA. Tahun 1867 dipimpin oleh Susan B. Anthony dan Elizabeth C. Stanton yang mendirikan *National American Woman Suffrage Association (NAWSA)* (Agustina, 2010: 128). Dengan adanya NAWSA pergerakan perempuan semakin berkembang. Banyak anggota NAWSA yang terus melakukan tekanan-tekanan terhadap negara untuk melakukan referendum. Namun hal itu belum dapat memberikan kemajuan yang signifikan bagi pergerakan *suffrage*, hal ini berdasarkan ungkapan Flexner dalam Evans (1994: 27-28) yaitu:

“Kampanye-kampanye lokal ini memberikan pengaruh positif karena melibatkan dan mendidik ribuan perempuan maupun generasi baru, serta mendirikan persekutuan-persekutuan lokal. Namun sebagai strategi, pengalaman membuktikan bahwa kampanye-kampanye ditingkat negara memang lemah. Antara tahun 1870 hingga 1910, empat ratus delapan puluh kampanye hanya menghasilkan tujuh belas referendum dan hanya dua diantaranya dianggap sebagai kemenangan bagi perjuangan hak pilih perempuan...”

Pada awal abad ke-20 pergerakan *suffrage* di Amerika Serikat mulai memasuki babak baru, hal ini terinspirasi oleh keberhasilan pergerakan perempuan di Inggris yang menuntut agar perempuan dapat duduk di parlemen. Saat itu keberhasilan organisasi *WSPU (Woman's Social political Union)* sangat menginspirasi para aktifis perempuan di Amerika Serikat. Dengan kembalinya seorang tokoh bernama Alice Paul ke Amerika Serikat pada tahun 1910 dan memimpin pergerakan *suffrage* disana hingga dikeluarkannya amandemen ke-19 mengenai kesetaraan hak.

Alice Paul adalah aktifis *suffrage* yang memimpin perjuangan untuk mendapatkan hak suara perempuan di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Dia

lahir pada 11 Januari 1885 di Moorestown, New Jersey Amerika Serikat. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga Quaker dan dibesarkan dengan pendidikan religius serta komitmen yang kuat untuk ide-ide progresif (Commire, 2001: 392). Dia mulai menjadi aktifis *suffrage* ialah ketika ia tinggal di Inggris pada tahun 1907. Dia pindah ke Birmingham, Inggris untuk berkerja di dinas Sosial. Ketika di Inggris ia bertemu dengan Cristabel Pankhurst putri dari Emmeline Pankhurst yang merupakan aktifis *suffrage* yang militan di Inggris, yang tergabung dalam *Woman's Social political Union (WSPU)*. Ia pun bergabung dengan WSPU. Karena cara perjuangan WSPU yang militan membuat para anggota WSPU sering kali ditangkap oleh polisi. Ia kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1910 sebagai seorang aktifis *suffrage* dengan ide “pergerakan militan membawa kesuksesan.” Pada tahun 1912 tokoh ini bergabung dengan NAWSA (*National American Woman Suffrage Association*). Selama bergabung dengan NAWSA dia menerapkan cara-cara yang militan dalam pergerakannya. Seringkali ia ditangkap polisi dan masuk penjara. Dia juga melakukan aksi mogok makan yang menyiksa dirinya sendiri. Alice Paul mengalami beberapa perselisihan dengan presiden NAWSA saat itu Carrie Chapman Catt mengenai cara-cara mereka memperjuangkan hak suara bagi wanita. Pada tahun 1915 presiden NAWSA mengagas rencana “*Winning Plan: Grassroot*” sebagai upaya mendapatkan dukungan dari kaum perempuan di negara itu. Namun pergerakan dengan Strategi *Grassroot* ini kurang mendapatkan hasil yang signifikan (Boyer, 1990: 772). Karena itulah Alice Paul kemudian keluar dari NAWSA dan membentuk organisasi lain bersama sahabatnya Lucy Burn yang sesuai dengan ideologinya bernama *National Woman Party (NWP)*. Dia membentuk organisasi ini sesuai dengan Ideologinya mengenai pergerakan yang militan dan progresif. Berdasarkan pengalamannya di Inggris bersama keluarga Pankhurst menunjukkan bahwa pergerakan yang militan dan progresif memberikan dampak yang besar bagi pergerakan feminisme disana (Buechler, 1990: 56). Karena itu dia lebih memilih

pergerakan yang militan dan progresif dibandingkan dengan pergerakan yang moderat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditemukan kesenjangan yaitu mengenai landasan negara Amerika Serikat yang tertuang dalam naskah deklarasi kemerdekaannya yang mengutamakan kebebasan hak-hak bagi seluruh manusia. Namun pada prakteknya sejak awal kemerdekaan Amerika Serikat peran perempuan masih termarginalkan baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Selain itu kesenjangan yang kedua ialah mengingat bahwa perjuangan kaum perempuan disana untuk mendapatkan kesetaraan hak terutama dalam haknya berpolitik yakni hak suara telah dimulai sejak pertengahan Abad ke-19 namun mengapa hal tersebut baru dapat terwujud pada awal abad ke-20, ketika seorang tokoh bernama Alice Paul mulai memimpin perjuangan untuk mendapatkan hak suara bagi wanita disana.

Berdasarkan pada pemikiran diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian ini. Perjuangan untuk memperoleh hak suara bagi wanita di negara tersebut merupakan perjalanan yang panjang. Pergerakan tersebut mulai berkembang sejak pertengahan abad ke 19, namun mengapa baru pada awal abad ke-20 ketika seorang tokoh yang bernama Alice Paul muncul akhirnya pergerakan tersebut mencapai tujuannya. Selain itu penulis menilai tokoh ini merupakan tokoh yang sangat berperan penting dalam pergerakan hak suara perempuan di Amerika Serikat, akan tetapi berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, masih sedikit kajian mengenai tokoh tersebut terutama dalam bentuk skripsi. Maka dari itu penulis mencoba untuk mengungkapkan peranan Alice Paul sebagai bagian dari perjuangan untuk memperoleh hak suara bagi wanita di Amerika Serikat. Dengan demikian peneliti ingin membuat penelitian yang berjudul **“Peranan Alice Paul Dalam Memperoleh Hak Suara Bagi Wanita Di Amerika Serikat (1910-1920).”**

Mengenai mengapa penulis memilih periode penelitiannya pada tahun 1910 hingga 1920 hal itu karena pada periode tersebut ia memulai pergerakannya

di Amerika Serikat setelah ia kembali dari Inggris pada tahun 1910. Alice Paul terus melakukan aksinya untuk memperoleh hak suara bagi wanita disana hingga amandement ke-19 mengenai kesetaraan hak disahkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada 26 Agustus tahun 1920.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan utama dalam penulisan skripsi ini adalah “ *Bagaimana peranan Alice Paul dalam memperjuangkan hak suara untuk wanita di Amerika Serikat.*” Berdasarkan batasan masalah tersebut, untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan mengarahkan dalam pembahasan maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah kedalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang Alice Paul memperjuangkan hak suara bagi wanita di Amerika Serikat?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan Alice Paul dalam memperjuangkan hak suara bagi wanita di Amerika Serikat?
3. Bagaimana dampak dari perjuangan Alice Paul bagi kehidupan sosial kaum perempuan di Amerika Serikat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang yang menyebabkan Alice Paul memperjuangkan hak Suara bagi wanita di Amerika Serikat.
2. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Alice Paul dalam memperjuangkan hak Suara wanita di Amerika Serikat.
3. Untuk mendeskripsikan dampak dari perjuangan Alice Paul dalam memperjuangkan hak suara bagi wanita di Amerika Serikat terhadap kehidupan sosial kaum perempuan Amerika Serikat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

Fury Ismaya, 2015

PERANAN ALICE PAUL DALAM MEMPEROLEH HAK SUARA BAGI WANITA DI AMERIKA SERIKAT (1910-1920)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Menambah bahan referensi sejarah, khususnya dalam bidang peranan perempuan dalam sejarah
2. Memberikan informasi mengenai gerakan perempuan di Amerika Serikat
3. Mempermudah dalam mempelajari dan menemukan literatur tentang pergerakan wanita, khususnya di Amerika Serikat.
4. Dalam mata pelajaran sejarah tingkat SMA kajian ini dapat memperkaya dan menunjang pemahaman siswa dalam menganalisis sejarah dunia yang mempengaruhi sejarah Indonesia. Selain itu kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya dan menunjang pemahaman mahasiswa Sejarah dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Barat, khususnya kajian mengenai sejarah Amerika dan mata kuliah Sejarah Sosial mengenai peranan perempuan dalam sejarah.

1.5 Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode historis yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis mengenai peninggalan masa lampau berdasarkan data yang telah diperoleh dan dikumpulkan. Metode historis ini bertujuan untuk merekonstruksi kejadian masa lampau secara sistematis. Metode historis memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan agar proses menguji dan menganalisis fakta dapat tercapai (Ismaun, 2007: 35). Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Heuristik (pengumpulan data), yaitu tahap mencari data dari beberapa sumber seperti buku, majalah, internet dan lain-lain. Pengumpulan data atau dalam penelitian ini sumber dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Hal ini disesuaikan dengan sifat penelitian skripsi ini, yakni penelitian literatur.
2. kritik, yaitu tahap menguji keabsahan sumber. Sumber yang telah terkumpul diuji keaslian (otentisitas) dan kesahihannya (kredibilitas), melalui kritik ekstern dan intern, dengan cara menguraikan dan mengecek silang data (*cross check*) yang ada dari berbagai sumber tersebut. Dari pengujian ini diambil data

yang paling dapat dipercaya, sehingga diperoleh sumber yang keotentikan dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Interpretasi (penafsiran) yaitu tahap analisis sejarah. Tahap ini bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.
4. Historiografi, merupakan penyusunan sejarah yang didahului oleh penelitian (analisis) terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu. Penyusunan ini disusun dengan selalu memperhatikan aspek kronologis, sehingga muncul hubungan antara fakta-fakta yang ada, tersaji dengan utuh, dan berkesinambungan, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Maka untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini perlu disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan pada bab ini, berisi mengenai uraian secara terperinci mengenai latar belakang masalah penulisan yang menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditujukan sebagai bahan penulisan proposal, ditunjukkan dari rumusan masalah yang diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian, serta mengenai metode penulisan dan sistematika dalam penyusunan skripsi.

Bab II kajian pustaka, pada bab ini penulis menjelaskan topik-topik permasalahan yang terdapat dalam penelitian, dengan mengacu kepada suatu tinjauan pustaka. Dengan demikian penulis mengharapkan tinjauan pustaka ini

dapat menjadi bahan acuan untuk membantu menerangkan temuan-temuan penelitian.

Bab III metode penelitian, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Lebih lanjut lagi, dalam bab ini penulis menguraikan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian yang berisi langkah-langkah dimulai dari persiapan sampai dengan langkah terakhir dalam penyelesaian penelitian ini.

Bab IV pembahasan, pada bab ini dibahas mengenai peranan Alice Paul dalam upaya memperoleh hak suara bagi wanita di Amerika Serikat. Pembahasan bab ini meliputi, keadaan sosial-politik wanita di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 yang menjadi latar belakang munculnya gerakan *suffrage* di Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan dengan latar belakang dari Alice Paul yang menyebabkan dia menjadi seorang aktivis *suffrage* di negara tersebut. Selanjutnya pembahasan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan Alice Paul dalam upaya memperoleh hak suara bagi wanita di Amerika Serikat. Setelah itu pembahasan mengenai hasil dari tindakan-tindakannya serta dampaknya bagi wanita Amerika Serikat pada masa itu dan pada masa mendatang.

Bab V kesimpulan pada bab terakhir ini penulis menuangkan kesimpulan dari hasil pembahasan, yang berisi interpretasi penulis terhadap kajian yang menjadi bahan penelitiannya disertai dengan analisis penulis dalam membuat sebuah kesimpulan atas jawaban-jawaban rumusan masalah yang ada. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat saran atau rekomendasi dari penulis yang diajukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

